

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Reformasi banyak membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Otonomi daerah dalam Undang- Undang No 22 tahun 1999 adalah otonomi luas yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan- kewenangan dibidang lainnya yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah.

Peran pemerintah di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak kepada hal- hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal- hal yang bersifat teknis dan tidak strategis sudah harus diserahkan kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kata lain otonomi daerah harus mampu

memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Sebagai konsekuensi dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber- sumber PAD terdiri dari

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain- lain PAD yang sah.

**Tabel 1**  
**Kontribusi PAD terhadap Belanja daerah di kota Gorontalo T.A 2004**  
**s/d T.A 2011**

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah	Kontribusi (%)
1	2004	16.589.980.000,00	181.786.220.000,00	9,12
2	2005	22.462.190.000,00	201.225.410.000,00	11,16
3	2006	26.228.430.000,00	268.980.320.000,00	10
4	2007	35.053.377.209,00	311.670.295.321,48	11,24
5	2008	43.125.193.544,00	406.161.117.340,00	10,62
6	2009	53.590.516.884,00	440.009.556.617,00	12,79
7	2010	25.284.859.751,00	451.965.632.491,00	5,59
8	2011	31.636.441.135,00	527.658.979.423,00	6
Jumlah		253.970.988.523,00	2.789.457.531.192,48	76,52
Rata – Rata		31.746.373.565	348.682.191.399,06	9,565

*Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Gorontalo*

Dilihat dari tabel diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah kota Gorontalo pada periode 2004- 2011 lebih kecil dibandingkan Belanja Daerah dan kontribusinya terhadap Belanja Daerah relatif kecil.

Dari fenomena di atas dalam kontes otonomi daerah, semestinya dalam menyelenggarakan otonomi tersebut ditunjukkan dengan peranan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan di dalam membiayai Belanja Daerahnya yang tercermin pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah yang bersangkutan. Melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di kota Gorontalo maka penulis tertarik untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kota Gorontalo.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Gorontalo dalam hal pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain- lain PAD yang sah belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat dilihat pada laporan realisasi anggarannya jumlah PADnya lebih kecil dibandingkan Belanja Daerah.
- 2) Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain- lain PAD yang sah yang belum maksimal mengakibatkan lemahnya tingkat Pendapatan Asli Daerah hal ini akan mengakibatkan peranan PAD yang kurang baik dalam membiayai Belanja Daerah

## **1.3 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di kota Gorontalo?

## **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

## **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri atas manfaat untuk praktisi, manfaat untuk akademisi dan manfaat untuk peneliti yaitu :

- 1) Untuk praktisi, untuk memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pembangunan pemerintah kota Gorontalo, khususnya pada Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Untuk akademisi, yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dengan masalah yang sama.
- 3) Untuk peneliti, yaitu untuk memperluas wawasan penulis terhadap penulisan karya tulis serta menambah pemahaman penulis mengenai Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.